

***ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ALLOCATION CAPITAL
EXPENDITURES ON DISTRICT AND MUNICIPAL GOVERNMENTS IN WEST
SUMATRA PERIOD 2017-2019***

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI
SUMATERA BARAT PERIODE 2017-2019**

Yois Nelsari Malau¹, Ade Rina Hutahaean², Lucia Fransiska Tampubolon³

Universitas Prima Indonesia^{1,2,3}

mail.aderina@gmail.com²

ABSTRACT

This study is aimed at analyzing the influence of PAD, DAU, DAK and DBH on Capital Expenditures in West Sumatra. The total population and sample are 19 districts/cities with a research period of 3 (three) years, namely 2017 to 2019 and using a saturated sampling technique as a sampling method. Testing the data hypothesis using the classical assumption test and the coefficient of determination obtained by Adjusted R Square of 0.612 means that what PAD, DAU, DAK and DBH can explain to regional expenditures is 61.2%, and other factors not examined in the study this is 38.8%. The results of the discussion partially prove that PAD, DAU and DBH do not affect capital expenditures. However, DAK influences capital expenditures. Simultaneously PAD, DAU, DAK and DBH influence capital expenditure.

Keywords : *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Capital Expenditure*

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis seperti apa korelasi DAU, DAK, PAD, serta DBH pada Belanja Modal di Sumatera Barat. Jumlah populasi dan sampel sebanyak 19 kabupaten/kota dengan periode penelitian selama 3 (tiga) tahun yakni 2017 hingga 2019 serta menggunakan teknik *sampling* jenuh sebagai metode pengambilan sampel. Pengujian hipotesis data menggunakan uji asumsi klasik dan koefisien determinasi yang didapat dari *Adjusted R Square* senilai 0.612 mengandung arti bahwasanya yang bisa diterangkan oleh PAD, DAK, DBH dan DAU pada belanja daerah senilai 61,2%, dan faktor lainnya diluar kajian ini sebesar 38,8%. Hasil pembahasan membuktikan PAD, DAU serta DBH tidak mempengaruhi belanja modal secara parsial. Namun, DAK memiliki dampak pada belanja modal. DAU, PAD, DAK serta DBH mempunyai dampak pada belanja modal secara bersamaan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal ialah penyerahan tanggung jawab juga pembagian kekuasaan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal termasuk didalamnya aspek penerimaan dan pengeluaran, guna peningkatan mutu serta kuantitas pelayanan publik, kesejahteraan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya wilayah dan memberdayakan pun menghasilkan ruang bagi warga untuk turut serta dalam pembangunan.

Sumber pemasukan wilayah yang berbentuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pemasukan Yang Legal. Tiap wilayah mempunyai keahlian yang berbeda dalam mendanai tiap aktivitas pemerintahannya, perihal tersebut yang bisa menyebabkan ketimpangan fiskal di masing-masing wilayah. Untuk menangani perihal ini, pemerintah menganggarkan dana dari APBN buat pengeluaran belanja daerah dalam penerapan desentralisasi. Pemerintah Pusat hendak memberikan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Dana Bagi Hasil untuk pembiayaan kebutuhan Belanja Modal tiap daerah.

Belanja modal yakni pengeluaran anggaran untuk menghasilkan *asset* tetap dan *asset* lain yang memberikan utilitas lebih dari periode akuntansi. Peruntukkan belanja modal berpatokan kepada kebutuhan wilayah akan fasilitas dan prasarana, untuk memudahkan penunaian tugas pemerintah pun untuk fasilitas publik.

Tabel 1. Alokasi Belanja Pemkab dan Pemko Sumatera Barat

Tahun	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai
2017	Rp4.298.471.477	Rp4.738.346.936	Rp686.605.970
2018	Rp3.848.183.743	Rp4.878.840.691	Rp624.976.314
2019	Rp5.026.616.647	Rp5.309.328.622	Rp785.503.445

Tabel di atas mengindikasikan distribusi belanja modal lebih kecil dibanding dengan belanja yang ada. Fakta yang diperlihatkan adalah lebih kecilnya alokasi belanja modal jikalau dibandingkan dengan belanja barang dan belanja pegawai. Rendahnya pengeluaran belanja modal berpengaruh kepada metode kerja pemerintahan. Jika ingin meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, pemerintah harusnya memberi alokasi belanja modal lebih besar serta menambah penghasilan daerah. Maka, ketika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sudah berdaya guna baik, pemerintah daerah akan memberi penambahan belanja modal setiap tahun untuk memenuhi juga memperbaiki fasilitas dan prasarana. Hal ini lah yang dapat membuktikan apakah ada pengaruh antara PAD, DAU, DAK dan DBH dengan alokasi belanja modal Pemerintah Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data skunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Data yang dipakai adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil periode 2017 – 2019 pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Berikut tahapan dalam metode regresi linier berganda :

1. Uji Normalitas

bertujuan untuk menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji ini menggunakan grafik normal *probability plot*. Berdistribusi normal jika titik-titik pada grafik sejajar garis diagonal (Ghozali, 2013).

2. Uji Multikolinieritas

berguna menguji model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak berkorelasi antar variabel independen. Tidak terjadi gejala multikolinieritas jika nilai *Tolerance* > 0,100 dan nilai VIF < 10,00 (Ghozali, 2013).

3. Uji Autokorelasi,

(Ghozali, 2012) dalam bukunya merumuskan bahwa uji autokorelasi menguji dalam model regresi adakah kolerasi antar kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada pada periode t-1.

4. Uji heteroskedastisitas

bertujuan untuk menguji model regresi adakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual antar satu pengamat ke pengamat lainnya. Jika *variance* tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

5. Analisis Linier Berganda, pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linier sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas (Ghozali, 2016). Model yang digunakan yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X₁ = PAD

X₂ = DAU

X₃ = DAK

X₄ = DBH

e = Kesalahan Residual (error)

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bagi variabel bebas yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH dan variabel terikatnya adalah Belanja

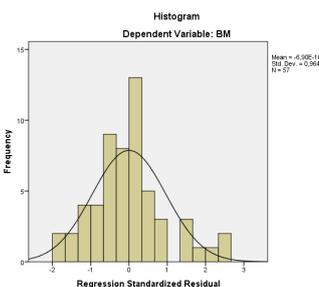
Modal. Total data yang diteliti dalam penelitian ini sebanyak 57 sampel dengan masa obeservasi 3 tahun. Berikut data variabel statistik dalam pembahasan ini:

1. Nilai minimum Pendapatan Asli Daerah (X₁) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2019 diperoleh Kabupaten Pariaman di tahun 2017 sebesar 30881846 dan nilai maksimum diperoleh Kota Padang di tahun 2017 sebesar 548653179. Nilai rata-rata dan nilai *standard deviation* yang diperoleh masing-masing sebesar 115880695,73 dan 104550456,085.
2. Nilai minimum Dana Alokasi Umum (X₂) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2019 diterima oleh Kota Sawahlunto di tahun 2018 sebesar 19362,86 dan nilai maksimum diterima oleh Kota Padang di tahun 2019 sebesar 34297,26. Nilai rata-rata dan nilai *standard deviation* yang diperoleh masing-masing sebesar 612837660,74 dan 194413884,832 .
3. Nilai minimum Dana Alokasi Khusus (X₃) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2019 diperoleh Kota Payahkumbuh di tahun 2019 sebesar 13185755 dan nilai maksimum diperoleh Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2019 sebesar 337757846. Nilai rata-rata dan nilai *standard deviation* yang diperoleh masing-masing sebesar 170917984,88 dan 82675558,319.
4. Nilai minimum Dana Bagi Hasil (X₄) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2019 diterima oleh Kabupaten Pasaman di tahun 2019 sebesar 8210498 dan nilai maksimum diterima oleh Kota Padang di tahun 2017 sebesar 66174694. Nilai rata-rata dan nilai *standard deviation* yang diperoleh

masing-masing sebesar 16744136,90 dan 11196025,446 .

5. Nilai minimum Belanja Modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2019 diterima oleh Kota Salahwunto di tahun 2018 sebesar 77527749 dan nilai maksimum diterima oleh Kota Padang di tahun 2019 sebesar 491009057. Nilai rata-rata dan nilai standard deviation yang diperoleh masing-masing sebesar 16744136,90 dan 11196025,446

Uji Normalitas



Gambar 1. Histogram

Sumber: Hasil Output SPSS

Grafik histogram menunjukkan bentuk yang simetris mengandung arti bahwa hasil dari uji normalitas data berdistribusi normal.

Nilai *Kolmogorov Smirnov Z* yang diperoleh sebesar 0,817 dengan *Asymp Sig* sebesar 0,516, berdasarkan penarikan kesimpulan dalam uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov* variabel residual berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

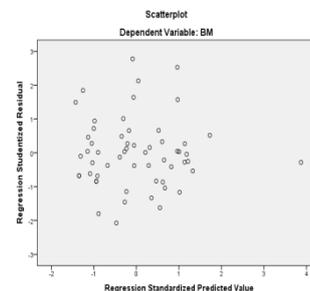
Nilai *Tolerance* dan *VIF* setiap variabel yakni PAD,DAU, DAK dan DBH lebih besar dari 0,10 dan lebih kecil dari 10, mengandung arti bahwa tidak ada gejala multikolonieritas berdasar pada pengambilan keputusan dari uji multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,828, nilai *dl* sebesar 1,4264 dan nilai *du* = 1,7253 serta nilai *4-du*= 2,2747.

Kesimpulan yang didapat adalah $du < dw < 4-du$ atau $1,7253 < 1,828 < 2,2747$. Yang mengandung arti bahwa data yang diuji tidak bergejala autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Scatterplot

Sumber: Hasil Output SPSS

Titik-titik dalam gambar *Scatterplot* diatas jelas memencar tidak beraturan dan tidak membentuk pola yang jelas dari atas sampai bawah serta titik-titik berada di antara angka nol pada sumbu Y yang mengandung arti bahwa terbukti data yang diuji tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Output dari masing-masing variabel dengan Uji Park memperoleh nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat memperkuat gambar *scatterplot* bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

$$\text{Belanja Modal} = 4034439,271 + 0,075 \text{ PAD} + 3854,527 \text{ SQRT_DAU} + 0,388 \text{ DAK} + 2,412 \text{ DBH}$$

Dapat diartikan sebagai berikut:

1. Hasil konstan senilai 4034439,271 yang mengandung arti bahwa jika nilai PAD, DAU,DAK dan DBH dianggap konstan, maka Belanja Modal tahun 2017-2019 sebesar 4034439,271.
2. PAD berpengaruh positif terhadap koefisien senilai 0,075, yang mengandung arti bahwa setiap pertambahan Rp1 PAD akan menaikkan Belanja Modal sebesar Rp0,075.

3. DAU berpengaruh positif terhadap koefisien senilai 3854,527, yang mengandung arti bahwa setiap penambahan Rp1 DAU akan menaikkan Belanja Modal sebesar Rp3854,527.
4. DAK berpengaruh positif terhadap koefisien senilai 0,388, yang mengandung arti bahwa setiap penambahan Rp1 PAD akan menaikkan Belanja Modal sebesar Rp0,388.
5. DBH berpengaruh positif terhadap koefisien senilai 2,412, yang mengandung arti bahwa setiap penambahan Rp1 PAD akan menaikkan Belanja Modal sebesar Rp2,412.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,612 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu Belanja Modal terhadap variabel terikat yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH sebesar 61,2%, 38,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor X.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)
Tabel 2. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,83E+17	4	4,57E+16	23,042	,000 ^b
Residual	1,03E+17	52	1,98E+15		
Total	2,86E+17	56			

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), PAD, SQRT_DAU, DBH, DAK,

Sumber: Hasil Output SPSS

Nilai probabilitas Uji F sebesar 0,000 dengan jumlah $F_{hitung} = 23,042$ dan $F_{tabel} = 2,55$. Maka, dapat dikatakan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $23,042 > 2,55$, mengandung arti bahwa H_0 ditolak H_a diterima, maka variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2017-2019.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)
Tabel 3. Uji T

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4034439	96565603		0,047	0,963
PAD	0,075	0,181	0,066	0,413	0,682
1 SQRT_DAU	3854,527	4931,394	0,185	0,782	0,438
DAK	0,388	0,176	0,454	2,21	0,031
DBH	2,412	1,21	0,27	1,993	0,051

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Output SPSS

PAD memiliki nilai Sig. sebesar 0,682 dengan nilai t_{hitung} 0,413 dan nilai t_{tabel} 2,00665. Dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,413 < 2,00665) dengan nilai probabilitas 0,05 maka H_a ditolak H_0 diterima, yang mengandung arti bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan oleh PAD terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2017-2019.

1. DAU memiliki nilai signifikansi 0,438 dengan nilai t_{hitung} 0,782 dan nilai t_{tabel} 2,00665. Dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,782 < 2,00665) dengan nilai probabilitas 0,05 maka H_a ditolak H_0 diterima, mengandung arti bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan oleh DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2017-2019.
2. DAK memiliki nilai signifikansi 0,031 dengan nilai t_{hitung} 2,210 dan nilai t_{tabel} 2,00665. Dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,210 > 2,00665) dengan nilai probabilitas 0,05 maka H_0 ditolak H_a diterima, mengandung arti bahwa adanya pengaruh yang signifikan oleh DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2017-2019.
3. DBH memiliki nilai signifikansi 0,051 dengan nilai t_{hitung} 1,993 dan nilai t_{tabel} 2,00665. Dapat

disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,993 < 2,00665$) dengan nilai probabilitas 0,05 maka H_a ditolak H_0 diterima, memiliki arti bahwa tidak terjadi pengaruh signifikan oleh DBH terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2017-2019.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Hasil uji coba mengindikasikan bahwasannya tidak ada pengaruh bermakna secara parsial oleh PAD pada belanja modal di Kota/Kabupaten Sumatera Barat tahun 2017 - 2019.

Pernyataan ini tidak sependapat dengan teori (Carunia, 2017) pemasukan yang didapat dari sumber dalam wilayahnya sendiri merupakan makna dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Semakin tinggi kemampuan keuangan yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah menurut (Carunia, 2017) berbanding lurus dengan peranan PAD di daerah tersebut.

Tetapi sependapat dengan riset Adyatma (2017) dikarenakan tidak berfokusnya pemerintah daerah untuk pemenuhan fasilitas dan infrastruktur yang memadai maka PAD tak berpengaruh signifikan kepada Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Dari hasil uji coba mengindikasikan bahwa secara individual tidak ditemukan pengaruh yang bermakna yang disebabkan oleh DAU pada belanja modal di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat sepanjang pengamatan 2017 - 2019.

Pernyataan ini tidak sependapat dengan teori Nordiawan (2017: 87), yaitu: dana yang dianggarkan guna meratakan kemampuan keuangan

daerah dalam mendanai keperluan daerahnya sebagai perwujudan desentralisasi fiskal dari APBN.

Pernyataan ini tidak sependapat dengan Juniawan pada riset terdahulu (2018) berjudul "Pengaruh DAU, PAD, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bali"

Pemda mengandalkan neraca dana daerah yang disediakan oleh pemerintah pusat guna membiayai kegiatan daerah, dibuktikan oleh dampak positif DAU pada belanja modal dan DAU yang terkait dengan pembangunan infrastruktur daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Dari hasil uji coba mengindikasikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan yang secara parsial disebabkan oleh DAK kepada belanja modal di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat sepanjang pengamatan 2017 - 2019.

Pernyataan ini sependapat dari teori Halim (2014: 16), DAK yaitu dana yang pemerintah alokasikan kepada wilayah terpilih, terutama sesuai dengan prioritas nasional dari APBN untuk mendukung pendanaan kegiatan khusus yang sebagai urusan daerah.

Pernyataan ini pun sama dengan pendapat Hairiyah (2017) pada riset sebelumnya berjudul "Pengaruh DAK, DAU, dan PAD Terhadap Belanja Modal" Besaran DAK yang diterima daerah itu berbanding lurus pada besarnya belanja modal yang berarti tingkah laku belanja modal mendapat pengaruh dari sumber pendapatan DAK, bisa dilihat sebelum terjadinya pemekaran Kalimantan Utara, DAU memberi pengaruh positif bermakna secara individual kepada belanja modal di kota/kabupaten provinsi Kalimantan Timur.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal

Dari hasil uji coba mengindikasikan bahwa secara parsial tidak ditemukan pengaruh bermakna yang disebabkan oleh DBH pada belanja modal di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 - 2019.

Pernyataan ini tidak sejalan dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004, terkait Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat serta Pemerintahan berisi Dana Bagi Hasil yakni modal yang diperuntukkan bagi daerah berdasar pada persentase dalam pendanaan keperluan daerah untuk perwujudan desentralisasi dari APBN

Pernyataan ini sependapat dengan hasil riset Cahyaning (2018) berjudul “Pengaruh DAU, PAD, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Sepanjang Pengamatan 2013-2015”, terhadap Alokasi Belanja Modal, DAU secara individual tidak memberi pengaruh karena daerah Jawa Timur tidak menggunakan DBH untuk pemenuhan belanja modal dan tidak menggantungkan belanja modalnya menggunakan DBH.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara parsial PAD, DAU dan DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan namun DAK menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2017 - 2019. Secara simultan PAD, DAU, DAK dan DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2017 - 2019.

Saran

Disarankan agar kedepannya dalam pengalokasian belanja modal dengan tepat dan cepat. Karena, tak bisa dipungkiri pertumbuhan ekonomi suatu daerah di zaman modern ini banyak bergantung pada pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana di daerah itu sendiri. Dan Pendapatan Asli Daerah pun sangat penting untuk ditingkatkan dan dikelola dengan baik terutama di beberapa kota/kabupaten yang memiliki PAD rendah sehingga ketergantungan akan transfer dana oleh pemerintah pusat dapat dikurangi hingga tercipta kemandirian ekonomi daerah yang pasti akan membawa pengaruh yang positif dalam perekonomian daerah maupun pusat di masa yang akan datang.

Kepada para peneliti yang akan datang agar dapat melakukan penelitian yang mencakup jumlah sampel dan populasi lebih luas, agar data yang diperoleh bisa diolah dengan sebaik-baiknya sehingga didapatkan hasil penelitian yang menggambarkan kecenderungan dari variabel - variabel yang diteliti lebih tepat dan akurat. Dan peneliti selanjutnya lebih baik menggunakan teori baru yang juga mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya dikarenakan akan banyak teori mengalami perubahan seiring berkembangnya pengetahuan dan berjalannya waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytama, Erdi, & Oktaviani. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomim Sebagai Moderasi , *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. E-Journal Universitas Udayana*, Hal 190-205.

- Cahyaning, S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Timr. *E-Journal Ilmu Ekonomi Terapan Universitas Airlangga*, 3(1).
- Carunia Mulya Firdausy. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Erlina, Sakti, O., & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Semarang : Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hairiyah, Lewi Malisan, & Zaki. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatann Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *E-Journal FEB Universitas Mulawarman*. 14(2), Hal 87-88.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji, & Dwirandra. (2014). Pengaruh PAD Pada Belannja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Joiurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 7(21), Hal 79-92.
- Juniawan, & Ni Putu Santi. (2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Journal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), Hal 127-129.
- Nordiawan, & Deddi. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Rifai, & Rachmawati.A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil(DBH) Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Journal Katalogis*. 5(7), Hal 169-180.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metpde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfbeta.